



Judul : Atasi Gejolak harga impor: ayo mulai swasembada kedelai
Tanggal : Sabtu, 12 Maret 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Atasi Gejolak Harga Impor

Ayo, Mulai Swasembada Kedelai

Persoalan pasokan dan tingginya harga kedelai merupakan masalah rutin yang terjadi setiap awal tahun. Sebab, Indonesia dipaksa untuk terus impor sebagai upaya menutupi tingginya kebutuhan dalam negeri.

ANGGOTA Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengatakan, solusi permasalahan ini cuma satu, yaitu swasembada. Harus ada kemauan keras dari bangsa ini untuk menghentikan kebiasaan impor terhadap setiap bahan kebutuhan pokok masyarakat.

Seperti halnya kedelai, lanjut Firman, hampir seluruh penduduk Indonesia mengkonsumsi tahu dan tempe yang bahan utamanya kedelai.

“Sementara petani kita ini belum mampu untuk budi daya atau swasembada, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus impor,” ucapnya.

Firman bilang, impor untuk menutupi defisit dalam negeri bisa dimaklumi, namun tidak boleh dibudayakan. Apa pun yang menjadi kebutuhan utama nasional, negara harus fokus untuk pemenuhannya dari dalam negeri. Tidak boleh lagi terlalu bergantung kepada importase pangan yang ujung-ujungnya membuat rakyat kesulitan.

Untuk jangka panjang, harus ada rencana kerja yang konkret mengatasi persoalan kedelai nasional. Toh komoditi ini sebenarnya bisa dibudidayakan di dalam negeri.

“Untuk swasembada gampang, cukup satu kalimat saja,

ada kemauan,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.

Komoditi kedelai, lanjut dia, memang dianggap tidak menarik karena tidak ada kepastian harga. Kedelai impor dianggap lebih murah daripada hasil panen petani.

Akibatnya, 90 persen kebutuhan nasional saat ini semuanya dari impor. Untuk meningkatkan gairah petani, harus ada perbaikan harga untuk kedelai lokal.

Firman mendukung upaya Kementan untuk meningkatkan produksi kedelai melalui upaya konsolidasi bersama pemerintah daerah. Inventarisir lahan-lahan yang bisa dioptimalkan untuk budi daya kedelai dan lakukan pendampingan untuk meningkatkan produktivitasnya, hingga pada aspek hilirisasi.

Kalau petani sudah mulai memproduksi, impor juga harus

ditekan. Tidak masalah beli mahal untuk petani kita yang jumlahnya jutaan jiwa ini.

“Daripada beli murah tapi yang menikmati cuma segelintir importir saja. Tapi ujung-ujungnya kita tergantung terus. Hasilnya seperti sekarang, kita terus jadi bulan-bulanan,” tegasnya.

Sekretaris Lembaga Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi menilai, masalah kedelai ini merupakan problem yang terjadi setiap tahun dan terus berulang.

Data Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan, produksi kedelai dalam negeri pada 2021 sebesar 215.000 ton.

Sementara kebutuhan kedelai dalam negeri rata-rata mencapai 9, 2 juta ton. Dari total kebutuhan tersebut, 7,2 juta ton berupa bungkil dan bubuk sisanya ke-

delai segar hampir 2 juta ton. “Ini artinya, ketersediaan kedelai Indonesia 90 persen lebih dari impor,” katanya.

Gandhi menjelaskan, peningkatan impor kedelai terjadi pasca Pemerintah Indonesia menandatangani *Letter of Intent* (LoI) International Monetary Fund (IMF) pada 1997.

Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus melakukan syarat-syarat yang diberikan oleh IMF yang tercantum dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP).

Terdapat 24 LoI dan MEFP yang disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan IMF, yaitu pengkatan APBN, peningkatan suku bunga, liberalisasi perdagangan, liberalisasi pasar kapital, dan privatisasi. Salah satu komoditas perdagangan yang mendapat tekanan liberalisasi adalah kedelai. ■ KAL